

Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Zonasi di SMAN 1 Cikande

Dessy Gita Kisnawati¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
6661190144@untirta.ac.id

Riswanda²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
riswanda@untirta.ac.id

ABSTRACT

The problem in this research is related to the implementation of new student admissions through the zoning route at SMAN 1 Cikande which is still facing many obstacles. These obstacles include a lack of socialization to the community, inadequate facilities, the age of prospective students who, even though they are close to the school, are still not accepted, an unclear acceptance radius, and unequal distribution between state schools and the calculation of the number of school-age children in a country. region, especially in Cikande District. The aim of this research is to see directly the implementation of student admissions through the zoning route at SMAN 1 Cikande. The theory used in this research is Critical Systems Thinking using four indicators from George C. Edward III, namely communication, resources, disposition and organizational structure. It is hoped that the results of this research can be a means for all stakeholders to find out how much impact and benefits the community gets from the policy of admitting new students through the zoning system and can be used as material for evaluating this policy in the future so that education in Indonesia becomes more advanced. The results of this research indicate that the PPDB Zoning policy at SMAN 1 Cikande has not been implemented optimally due to a lack of technical outreach to the community, an imbalance in capacity with the number of registrants, and the community's mastery of information technology.

Keywords: *Implementation, Zoning System, Acceptance of New Students*

LATAR BELAKANG

Kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan dan situasi yang terjadi di masyarakat. Keputusan yang diambil oleh pemerintah akan menentukan kondisi suatu bangsa di masa depan. Kebijakan tersebut diimplementasikan setelah melalui berbagai pertimbangan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang berdampak pada sesuatu. Secara singkat, implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan peraturan menjadi tindakan (Agustino, 2017, hal. 126). Untuk mewujudkan masa depan negara

yang baik, pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan negara. Kebijakan pendidikan termasuk dalam kategori kebijakan pembangunan sosial karena setiap kebijakan terkait pendidikan akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di suatu negara. Pendidikan akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan di masa depan.

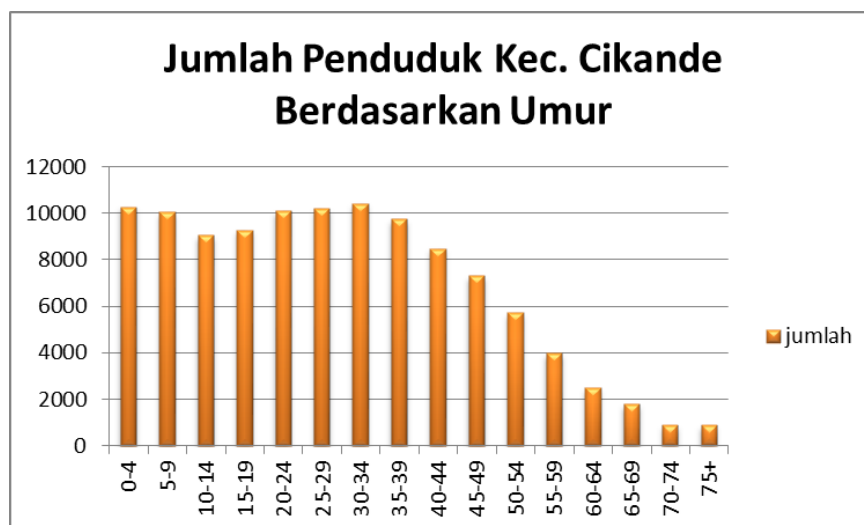
Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap individu, baik formal maupun informal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak usia sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2021/2022 mencapai 24,33 juta orang. Data ini menjadi salah satu pertimbangan dalam meningkatkan sistem penerimaan peserta didik baru agar kualitas pendidikan merata. Karena pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, kebijakan penerimaan siswa baru memperkenalkan sistem zonasi, yaitu penerimaan siswa dengan mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal siswa dan sekolah. Kebijakan zonasi ini telah diterapkan sejak 2018 dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Ada empat jalur pendaftaran sekolah yang dapat ditempuh oleh siswa, yaitu jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua, afirmasi, dan zonasi. Peneliti memilih untuk meneliti jalur zonasi karena jalur ini menghadapi banyak masalah di lapangan.

Peneliti tertarik meneliti PPDB jalur zonasi karena banyaknya pro dan kontra sejak kebijakan ini diterapkan pada 2018. Meskipun telah mengalami perubahan dan evaluasi, kebijakan ini masih menghadapi masalah dalam pelaksanaannya. Banyak orang tua siswa masih beranggapan bahwa sekolah negeri favorit lebih baik dibandingkan yang non-favorit. Selain itu, banyak orang tua siswa yang mengeluhkan sistem pendaftaran yang dianggap rumit. Hal ini bertentangan dengan tujuan PPDB jalur zonasi yang bertujuan untuk menghapus konsep sekolah favorit dan meratakan fasilitas sekolah. Kapasitas tampung yang terbatas juga menjadi masalah dalam kebijakan ini. Sebagai contoh, daya tampung SMAN 1 Cikande di Kecamatan Cikande adalah 432 siswa, sementara jumlah pendaftar yang terverifikasi melalui jalur zonasi pada tahun 2022 sudah mencapai 434 siswa. Angka tersebut belum termasuk siswa yang diterima melalui jalur perpindahan orang tua, afirmasi, dan prestasi. Di Kecamatan Cikande, terdapat sekitar 9.237 anak usia

sekolah dalam rentang usia 15-19 tahun yang ideal untuk masuk SMA. Jalur zonasi ini membatasi jangkauan penerimaan siswa baru hingga maksimal 1,4 km. Padahal, kecamatan ini memiliki luas 45,96 km² dengan 13 desa.

Hal ini menimbulkan polemik karena hanya ada satu SMA negeri di Kecamatan Cikande yang belum mampu menampung 10% dari jumlah anak usia sekolah di kecamatan tersebut dengan wilayah yang begitu luas. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Cikande karena wilayah ini merupakan kawasan industri yang luas dengan banyak pencari kerja dan pendatang, menjadikannya wilayah yang sangat berkembang. Menurut data BPS, dari tahun 2018-2020, jumlah penduduk Kabupaten Serang meningkat dari 1.538.300 menjadi 1.622.630 jiwa. Kecamatan Cikande sendiri memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Serang dengan peningkatan dari 98.526 menjadi 110.569 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat kebutuhan akan pendidikan sangat penting. Pada tahun 2020, jumlah anak usia sekolah dari jenjang SD hingga SMA sekitar 30.000 orang. Hal ini menjadikan Kecamatan Cikande sebagai wilayah dengan jumlah anak usia sekolah terbanyak di Provinsi Banten. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Cikande



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Di Kecamatan Cikande terdapat banyak sekolah dengan jumlah anak usia sekolah yang tinggi. Menurut <https://referensi.data.kemdikbud.go.id>, ada 91 sekolah negeri dan swasta di Kecamatan Cikande, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Meskipun Kecamatan Cikande memiliki banyak sekolah, masih banyak masyarakat yang pro dan kontra terhadap kebijakan ini. Terutama karena hanya ada satu SMA negeri yang belum mampu menampung seluruh anak yang berdomisili di Kecamatan Cikande melalui jalur zonasi. Banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam pendaftaran ke sekolah negeri, kurangnya informasi dan penguasaan teknologi, serta kurangnya sosialisasi. Selain itu, sulitnya proses pendaftaran dan kurangnya transparansi dalam penerapan zonasi membuat masyarakat merasa kebijakan ini tidak cocok dan rumit.

Di sini ditemukan beberapa masalah, yaitu adanya anggapan tentang kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit, masalah transparansi dan akurasi jarak penerimaan, serta banyaknya celah dalam PPDB yang dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan. Kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memungkinkan terjadinya kecurangan dalam sistem zonasi ini. Pendaftaran ke sekolah negeri juga sulit karena tidak adanya sosialisasi yang diberikan kepada siswa maupun orang tua. Selain itu, data anak usia sekolah di wilayah tertentu sering kali kurang valid dan kurang diperhatikan, yang menyebabkan ketimpangan daya tampung sekolah. Ditambah lagi, jumlah sekolah yang tidak seimbang dengan cakupan wilayah dalam pelaksanaan PPDB juga menjadi masalah. Peneliti ingin melakukan penelitian ini karena didorong oleh kebijakan PPDB yang bertujuan untuk meratakan kualitas pendidikan melalui sistem penerimaan siswa baru berbasis zonasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model dari buku Winarno (2016: Hal. 155) yang menjelaskan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Model ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan masalah terkait implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMAN 1 Cikande. Peneliti menggunakan pendekatan Critical System Thinking untuk mengatasi kesenjangan antara faktualisasi yang terlalu abstrak dan abstraksi realitas yang terlalu faktual, serta untuk menyeimbangkan antara perspektif etic dan emic. Pendekatan ini kemudian menjadi kerangka dalam teori Edward.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti memilih metode ini untuk mendapatkan dan menyajikan banyak fakta (dokumen dan hasil wawancara) dari orang yang terlibat secara maksimal dan menyeluruh, sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian, dengan memperhatikan boundary judgement. Metode ini menghubungkan dan mengaitkan antara fakta, norma nilai, dan sistem. Peneliti memilih penelitian kualitatif karena menggunakan variabel mandiri dan tidak membandingkan variabel dengan sampel lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati gejala atau kendala dalam masalah yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan Permendikbud RI No.1 Tahun 2021 Mengenai Penerimaan Siswa Baru Dengan Sistem Zonasi di SMAN 1 Cikande. Kebijakan ini mengatur PPDB dengan sistem zonasi untuk meratakan kualitas pendidikan. Namun, kebijakan ini belum mencapai sasaran karena banyak sekolah yang belum tersebar dengan baik sesuai usia anak sekolah. Kualitas pengajar dan fasilitas di daerah pedesaan dan perkotaan berbeda. Banyak siswa yang menginginkan fasilitas dan pengajar terbaik, namun mereka harus merogoh lebih dalam koceknya untuk mencari sekolah yang dapat menerima mereka, bahkan jika itu berarti sekolah lebih jauh dari rumah mereka. Contoh dari penelitian sebelumnya di SMAN 1 Cikande menunjukkan bahwa penyebaran peta zonasi yang tidak jelas menyebabkan banyak masyarakat pribumi tidak dapat bersekolah di sana. Prinsip yang harus dijunjung adalah nilai keadilan dan kesetaraan dalam seluruh sistem PPDB jalur zonasi agar semua anak Indonesia mendapatkan hak yang sama, termasuk anak-anak di daerah terpencil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi, Komunikasi adalah kunci keberhasilan suatu kebijakan. Komunikasi yang efektif akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi ini mencakup alur informasi yang disampaikan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada komunikasi yang baik karena ketidaksesuaian informasi dapat menyebabkan kegagalan. Semua pelaksana kebijakan harus mengetahui, memahami, dan mengerti tujuan dari kebijakan tersebut. Sebagai pembuat kebijakan dan agen pelaksana Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten harus mensosialisasikan kebijakan ini kepada semua unit pelaksana. Unit pelaksana di sini adalah SMA 1 Cikande yang bertugas menyelenggarakan PPDB di Provinsi Banten. SMA 1 Cikande akan meneruskan informasi tersebut kepada penerima manfaat kebijakan ini, yaitu masyarakat. Penelitian menemukan beberapa temuan, di antaranya adalah bahwa sosialisasi tentang PPDB SMA tidak langsung dilakukan kepada masyarakat, tetapi melalui kepala sekolah masing-masing SMP asal. Sosialisasi hanya dilakukan melalui spanduk yang dipasang di depan sekolah dan pamflet yang diunggah di situs web sekolah, sumber: <http://ppdb.sman1cikande.sch.id/>. Mengenai jarak dalam PPDB, tidak ada patokan resmi, dan penentuannya bergantung pada sistem, sehingga sekolah tidak dapat menentukan jarak terjauh untuk PPDB zonasi. Petunjuk teknis juga tidak disosialisasikan kepada masyarakat, mereka hanya mendapatkan tata cara pendaftaran, dan petunjuk teknis hanya mencakup tingkat SMA saja.

Sumber daya, Sumber daya dalam konteks ini mencakup sumber daya manusia, sarana pendukung, dan kualitas layanan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Dimensi sumber daya menjadi sangat penting dalam pelaksanaan program karena sumber daya adalah pendorong utama dalam sebuah program. Jika sumber daya tidak mencukupi, pelaksanaan program akan terhambat dan tidak dapat berjalan sesuai harapan. Sumber daya manusia di SMAN 1 Cikande menjadi aspek penting dalam implementasi PPDB. Panitia PPDB terdiri dari guru dan staf yang memiliki pengetahuan tentang IT. Mereka akan difasilitasi dan dilatih mengenai PPDB ini sebanyak tiga kali. Terdapat tujuh operator, satu ketua pelaksana, dan satu operator utama yang akan mengkoordinasi operator lainnya ke server PPDB. Pemilihan sumber daya manusia yang handal dan kompeten juga akan memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sarana yang diberikan termasuk komputer dengan teknologi terkini, jaringan internet yang stabil, dan server PPDB yang disediakan oleh PT. Telkom Indonesia. Sekolah juga memiliki pengajar yang berkualitas dan menghapuskan label "non-favorit" dari sekolah tersebut. Fasilitas sekolah juga menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu sekolah untuk mendukung

pembelajaran. Dengan demikian, SMAN 1 Cikande siap dalam melaksanakan PPDB untuk menampung seluruh siswa yang diterima.

Disposisi, Faktor keberhasilan suatu kebijakan adalah sikap dari pelaksana kebijakan atau implementor kebijakan. Implementor harus memiliki pengetahuan dan sikap pelayanan yang baik. SMAN 1 Cikande, dengan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai, mampu membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam pelaksanaan PPDB. Mereka dengan senang hati membantu masyarakat dalam pelaksanaan PPDB. Meskipun memerlukan waktu, mereka dengan sepenuh hati mau membantu masyarakat yang mengalami masalah dalam pendaftaran PPDB, seperti penentuan jarak menggunakan opsi kamera di aplikasi, kelengkapan surat persyaratan, dan proses verifikasi. Masyarakat sebagai pihak penerima manfaat kebijakan merasa senang dengan sikap profesional dan cekatan para operator dalam menangani masalah mereka.

Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi meliputi struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi di dalamnya, serta hubungan dengan organisasi eksternal. Birokrasi adalah bentuk organisasi modern yang mengikuti aturan baku dalam menjalankan aktivitas kerja. Semua aktivitas kerja diatur secara legal formal. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur operasional standar (SOP) sangatlah penting. Di SMAN 1 Cikande, semua kegiatan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan SOP kebijakan. Meskipun demikian, masih ada kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan. Mereka mengatasi kendala tersebut dengan melakukan evaluasi harian. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, diharapkan kendala-kendala ke depan dapat segera diatasi dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi di SMAN 1 Cikande telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2021, namun implementasinya belum optimal karena kurangnya sosialisasi teknis kepada masyarakat, ketidakseimbangan antara kapasitas sekolah dengan jumlah pendaftar, dan tingkat

penguasaan teknologi informasi masyarakat yang belum merata. Proses PPDB sistem zonasi diukur menggunakan indikator oleh George Edward III, antara lain: *Pertama*, Sosialisasi PPDB SMA tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat, melainkan melalui kepala sekolah masing-masing SMP asal. Sosialisasi hanya dilakukan melalui spanduk yang dipasang di depan sekolah dan pamflet di situs web sekolah, sumber: <http://ppdb.sman1cikande.sch.id/>. Mengenai jarak dalam PPDB, tidak ada patokan resmi, dan penentuannya bergantung pada sistem, sehingga sekolah tidak dapat menentukan jarak terjauh untuk PPDB zonasi. Petunjuk teknis juga tidak disosialisasikan kepada masyarakat, mereka hanya mendapatkan tata cara pendaftaran, dan petunjuk teknis hanya mencakup tingkat SMA saja.

Kedua, Panitia PPDB terdiri dari guru dan staf internal SMAN 1 Cikande yang memiliki pengetahuan tentang IT. Mereka akan difasilitasi dan dilatih mengenai PPDB ini sebanyak tiga kali. Terdapat tujuh operator, satu ketua pelaksana, dan satu operator utama yang akan mengkoordinasi operator lainnya ke server PPDB. Pemilihan sumber daya manusia yang handal dan kompeten juga akan memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sarana yang diberikan termasuk komputer dengan teknologi terkini, jaringan internet yang stabil, dan server PPDB yang disediakan oleh PT. Telkom Indonesia.

Ketiga, Aspek disposisi, implementor dengan senang hati membantu masyarakat dalam pelaksanaan PPDB. Meskipun memerlukan waktu, mereka dengan sepenuh hati mau membantu masyarakat yang mengalami masalah dalam pendaftaran PPDB. *Terakhir*, Pelaksanaan kebijakan dan SOP kebijakan sangatlah penting. Seperti yang dilakukan di SMAN 1 Cikande, seluruh kegiatan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan. Mereka membuktikan bahwa struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Apabila terjadi kendala, mereka segera melakukan evaluasi guna menanggulangi masalah yang sama di masa depan.

REFERENSI

Agustino,L. (2017). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Afabeta.

- Budi, S., & Yufridawati. (2020). *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Huberman, M., & Jonny. (2014) .*Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Singapore :SAGE
- Raharjo, dkk. (2020).*Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*. Jakarta: Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/ kajian yang dilakukan olehPusat Penelitian Kebijakan .
- Sugiyono. (2017).*Metode Penelitian Administrasi di Lengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto,P. (2019). *Zonasi Pendidikan. Membangun Inspirasi tanpa Diskriminasi* ©2019 *Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA.
- Syahrum., & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapusaka Media.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Winarno,Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.